



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI RIAU**

JI. HR. SUBRANTAS Km. 10 PEKANBARU

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas izin dan perkenan Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Riau Tahun 2019 telah dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Riau Tahun 2019 adalah instrumen perencanaan yang memberikan gambaran mengenai kebijakan dan kegiatan prioritas yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap bidang dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Riau, yang dilakukan secara terintegrasi, terkoordinasi dan terpadu, dan bertujuan untuk meningkatkan dan memantapkan pelaksanaan kegiatan prioritas sesuai dengan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Riau, dalam kerangka pelaksanaan kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Riau. Selanjutnya Renstra tersebut akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan sesuai dengan skala prioritas.

Penyusunan Rencana Kerja ini berpedoman dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2014 -2019, Rencana Startegis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Riau 2014-2019 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019.

Semoga Rencana Kerja ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pelayanan publik bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Provinsi Riau dan bermanfaat sebagaimana mestinya.

Pekanbaru,

2018

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI RIAU,**



Drs. H. SYARIFUDDIN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP : 19620504 198803 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika.....	4
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu	
dan Capaian Renstra PD	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	13
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi PD	29
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	32
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	39
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PD.....	42
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	42
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD 2019	46
3.3 Program dan Kegiatan.....	48
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAN PD.....	61
4.1 Rencana Program dan Kegiatan Dinas PMD.....	61
BAB V.PENUTUP.....	65
5.1 Catatan Penting dalam penyusunan RENJA.....	65
5.2 Kaedah-kaedah Pelaksanaan	65
5.3 Rencana Tindak Lanjut	65

DAFTAR TABEL

Tabel T-C. 29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD	
	dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2018	9
Tabel T-C. 30	Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas PMD	17
Tabel 2.3	Data Lembaga Kemasyarakatan	
	di Provinsi Riau Tahun 2016	21
Tabel 2.4	Rincian Data Pembagian Wilayah	
	Administratif Provinsi Riau	25
Tabel 2.5	Tipologi Desa/ Kelurahan	
	Di Provinsi Riau	25
Tabel 2.6	Tabel Indeks Desa membangun (IDM)	25
Tabel 2.7	Data BUM Desa Tahun 2017 di Provinsi Riau	27
Tabel 2.8	Data BUM Desa Tahun 2018 di Provinsi Riau	28
Tabel 2.9	Tabel Jumlah Posyantek Se Provinsi Riau Tahun 2017	29
Tabel T-C. 31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	
	Tahun 2019 Provinsi Riau	33
Tabel T-C. 32	Usulan Program dan Kegiatan Dinas PMD Prov Riau.....	40
Tabel 3.1	Roadmap Dana Desa	46
Tabel 3.2	Program dan Kegiatan Serta Indikator Kerja	
	Dinas PMD Provinsi Riau Tahun 2019	49
Tabel T-C. 33	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan PD	
	Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020	
	Dinas PMD Provinsi Riau	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perubahan atas UU 32 Tahun 2004 mengandung muatan perubahan yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan daerah. Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Penetapan Undang-Undang tersebut mengandung konsekwensi bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam merumuskan rencana program dan kegiatan serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan dan karakteristik daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan kemudian disusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) sebagai agenda tahunan OPD.

Sehubungan dengan itu, sebagai tindak lanjut dari Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019 maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Riau menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal-Renja) Tahun 2019 yang berfungsi menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD ke dalam program dan kegiatan OPD serta didalamnya memuat sasaran-sasaran pokok yang

harus dicapai, arah kebijakan, program-program pembangunan dan kegiatan pokok pembangunan dalam 1 (satu) tahun, sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program Provinsi Riau dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD) Dinas PMD Provinsi Riau Tahun 2019, payung hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
- 4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2005 No. 140, Tambahan Lembaran Negara No. 4578);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 - 10) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 9);
 - 11) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2014 -1019
 - 12) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau
 - 13) Keputusan Gubernur Nomor : Kpts.784/XI/2014 Tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2014-2019;
 - 14) Keputusan Gubernur Nomor 39 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019;

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud kegiatan penyusunan Ranwal-Renja Dinas PMD Provinsi Riau adalah untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik pada tahun 2019.

Adapun tujuan kegiatan penyusunan Ranwal Renja OPD Dinas PMD Provinsi Riau adalah;

- Sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2019 bagi Dinas PMD Provinsi Riau dalam melaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan Provinsi Riau

- Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Ranwal Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan penjelasan ringkas tentang Renja Dinas PMD Provinsi Riau, dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas PMD Provinsi Riau, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas PMD Provinsi Riau.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan serta susunan garis besar dari isi Renja.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisihkan tentang sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD serta rumusan indikasi program kegiatan pada tahun 2019;

BAB IV. PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup, berupa : catatan penting yang perlu mendapat perhatian; kaidah-kaidah pelaksanaan; dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Riau merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau Tahun 2014-2019. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau selama tahun 2017 (N-2) dan perkiraan target tahun 2018 (N-1).

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan merealisasikan visi. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Pengukuran kinerja didasarkan pada dimensi-dimensi sasaran yang terdapat pada indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja

instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja menurut Perpres No. 29 Tahun 2014 harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Pengukuran capaian kinerja Dinas PMD Provinsi Riau Tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan rencana tingkat capaian (*target*) masing-masing indikator kinerja utama dengan capaian kinerja nyata (*realisasi*). Dinas PMD Provinsi Riau telah menetapkan tujuan dan sasaran strategis beserta indikatornya yang digunakan untuk menginformasikan kinerja, baik berupa *output* maupun *outcome*. Capaian kinerja Dinas PMD Provinsi Riau Tahun 2017 secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Riau

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2015-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2018	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
	Program Pengembangan Data/Informasi									
	Penyusunan Data dan Informasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan Desa	Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi	1	0	1	1	100	0	1	100
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran							0	0
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikirim	5750	2.300	1150	1150	100	1150	4600	80
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rentang waktu penyediaan alat tulis kantor	60	24	12	12	100	12	48	80
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rentang waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60	24	12	12	100	12	48	80
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rentang waktu penyediaan komponen instalasi listrik	60	24	12	12	100	12	48	80
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Rentang waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60	24	12	12	100	12	48	80

				Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	36054	16.254	1550	1550	100	1550	19354	53,68
				Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensirapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	622	484	110	110	100	110	704	113,18
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Rentang waktu penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik	60	24	12	12	100	12	48	80
				Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD	Rentang waktu penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasa	60	24	12	12	100	12	48	80
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasi onal yang dipelihara	60	24	12	12	100	12	48	80
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	60	24	12	12	100	12	48	80
				Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung	Rentang waktu penyediaan jasa keamanan kantor/Gedung	60	24	12	12	100	12	48	80
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								0	0
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	10	0	5	5	100	5	10	100
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	262	55	1	1	100	1	57	21,76
				Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	5	2	3	3	100	0	5	100
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	60	30	30	30	100	30	90	150
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	5	2	1	1	100	1	4	80
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur								0	0
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu	370	180	95	95	100	0	275	74,32

				Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah peserta pendidikan fisik dan mental	370	180	95	95	100	0	275	74,32
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								0	0
				Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan Formal	281	146	45	45	100	45	236	83,99
				Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Jumlah Pawai yang mengikuti Pembinaan Fisik dan Mental	485	194	97	97	100	97	388	80
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								0	0
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	16	3	12	12	100	0	15	93,75
				Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulan, Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah pelaporan Keuangan Triwulan, Semesteran dan akhir tahun	6	2	3	3	100	0	5	83,33
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan SKPD	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi	3	1	1	1	100	1	3	100
				Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah Dokumen Renja	5	2	1	1	100	0	3	60
				Rapat Koordinasi pada setiap SKPD	Jumlah ASN PMD Kab dan Kota yang mengikuti Rakornis	250	100	50	50	100	0	150	60
				Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan								0	0
				Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Riau	Jumlah karya ilmiah dan penemuan alat TIG oleh inventor dan inovator dan inovator	200	125	75	75	100	75	275	137,5
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat di Provinsi Riau	1590	500	460	460	100	1200	2160	135,85
				Perlombaan Desa dan Kelurahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kel melalui LOMBA Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Riau	110	44	12	12	100	12	68	61,82

				Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional	Terlaksananya Tranformasi, Alih Teknologi dan Pemasyaraka t Alat2 TTG Tingkat Nasional melalui Gelar TTG Tingkat Nasional tahun 2017	60	24	12	12		12		100	48	80
				Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BB-GRM) Tk. Provinsi	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan BBGRM	2500	1000	500	500		500		100	2000	80
				Peningkatan Pelayanan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM)	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) di 12 Kab/Kota	48	12	12	12		12		100	36	75
				Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan				-	-		-			0	0
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan BUMDes se Provinsi Riau	Jumlah Pengurus BUMDes yang Mendapatkan Peminaan	780	180	160	160		800		100	1140	146,15
				Bimbingan Teknis Pengelolaan Pasar Desa se-Provinsi Riau	Jumlah Pengelola Pasar Desa yang mengikuti BIMTEK	480	180	60	60		60		100	300	62,5
				Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa				-	-		-			0	0
				Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa se-Provinsi Riau	Jumlah Peserta Rakor dalam rangka Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Pembinaan Kapasitas Aparatur Desa di Provinsi Riau	3.416	2465	950	950		1.300		100	4715	138,03
				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Desa	Terlaksananya Sosialisasi Perundang-undangan Tentang Desa	350	100	210	210		500		100	810	231,43

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau sebelumnya bernama Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan Desa Provinsi Riau. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengakibatkan adanya transformasi dalam pembentukan organisasi perangkat daerah salah satunya pada urusan wajib non pelayanan dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kebijakan ini ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, Pasal 3 ayat 1 huruf d poin 11 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Dinas Tipe A dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Sub Bagian serta 4 (empat) Bidang dengan 12 (dua belas) Seksi dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat

Terdiri dari 3 (tiga) sub bagian, antara lain:

- 1) Sub Bagian Perencanaan Program ;
- 2) Sub Bagian Keuangan,Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu:

- 1) Seksi Peningkatan SDM Lembaga Kemasyarakatan;
- 2) Seksi Sosial Budaya Masyarakat dan Komunitas Adat;
- 3) Seksi Keswadayaan Masyarakat.

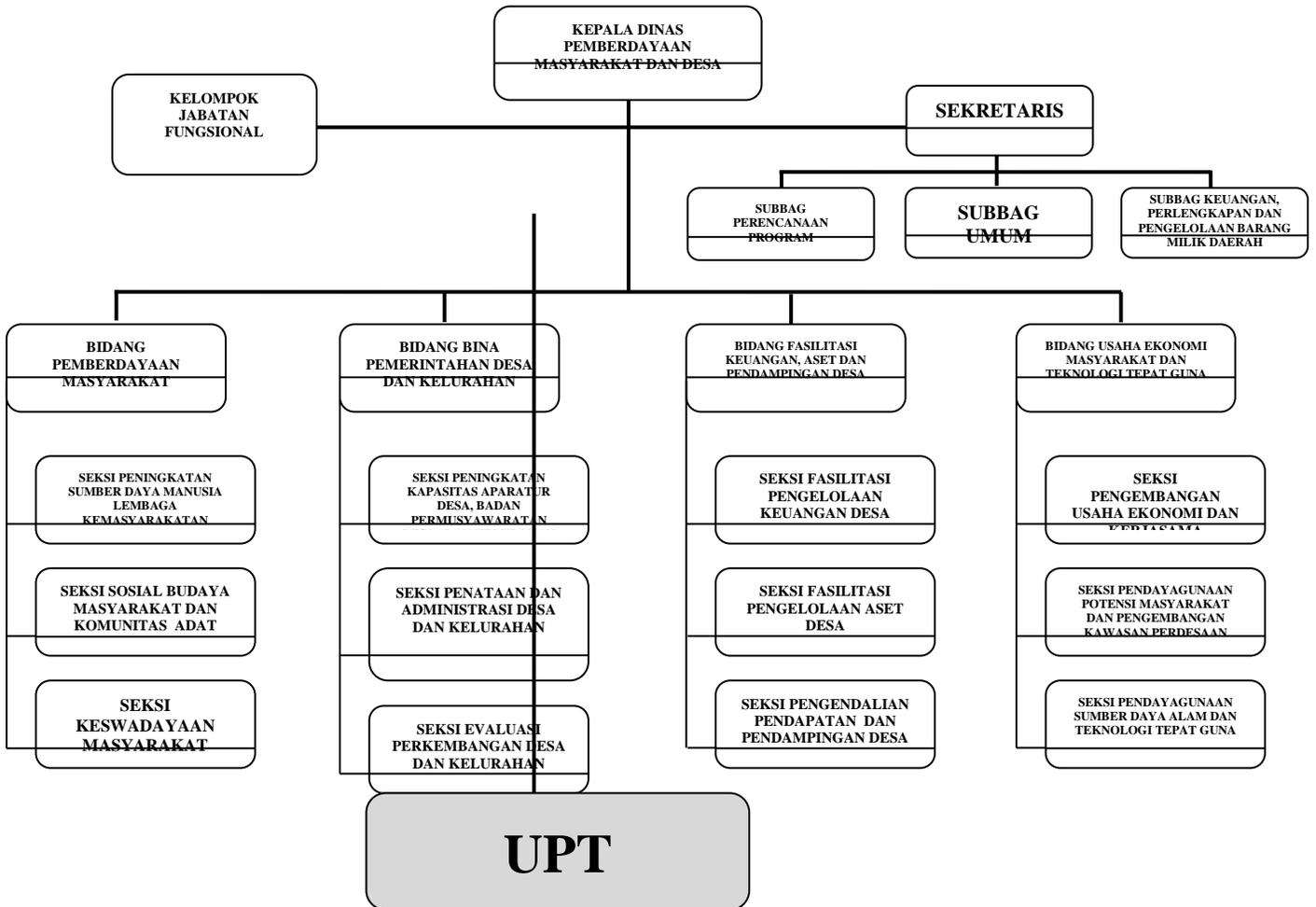
1. Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu:

- 1) Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, BPD dan Kelurahan;
- 2) Seksi Penataan dan Administrasi Desa dan Kelurahan;

- 3) Seksi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.
2. Bidang Fasilitasi Keuangan, Aset dan Pendampingan Desa
Terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - 1) Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 2) Seksi Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa;
 - 3) Seksi Pengendalian Pendapatan dan Pendampingan Desa.
6. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan TTG
Terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - 1) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Masyarakat;
 - 2) Seksi Pendayagunaan Potensi Masyarakat dan Pengembangan Kawasan Perdesaan;
 - 3) Seksi Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tepat Guna.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI RIAU



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau.

Dalam menjalankan TUPOKSI melaksanakan pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan dan pembangunan desa di Provinsi Riau diatas, Dinas PMD Provinsi Riau telah menetapkan sasaran strategi serta Indikator Kinerja Utama yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas PMD Provinsi Riau tahun 2013-2018. Untuk melihat sejauh mana capaian kinerja pelayanan Dinas PMD Provinsi Riau dapt dilihat dalam tabel berikut:

Tabel T-C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
			(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	
-1	-2	-4	-5	-6	-7	-8	-6	-9	-8	-11	-12
1	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan, partisipasi masyarakat, tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat, pelestarian adat istiadat dan budaya lokal yang maju dan dinamis dalam pembangunan masyarakat desa/kelurahan;	Persentase tingkat swadaya masyarakat dalam pembangunan (dari Total Pendapatan Desa)	3%	3%	3%	10%	2%	2,5%	10%	10%	
2	Meningkatnya efektifitas pelayanan, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pelayanan publik;	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang akuntabel (%)	3%	3%	3%	10%	3%	10%	10%	30%	
3	Meningkatnya Kemandirian Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa melalui pemanfaatan Potensi Masyarakat, Pengembangan Kawasan Perdesaan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;	Jumlah BUMdes Mandiri	10	20	50	50	10	20	80	110	
		Jumlah Pasar Desa Mandiri	10	20	50	50	10	20	80	110	
		Jumlah Posyantek Mandiri	10	20	50	50	10	20	80	110	

Berdasarkan Tabel. T-C. 30 di atas berikut ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau diarahkan pada 3 (tiga) sasaran strategis untuk mencapai 2 (dua) indikator kinerja utama. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan, partisipasi masyarakat, tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat, pelestarian adat istiadat dan budaya lokal yang maju dan dinamis dalam pembangunan masyarakat desa/kelurahan;

Kinerja sasaran ini mempunyai target berfungsinya berbagai lembaga kemasyarakatan yang ada ditingkat desa, sehingga dapat tercipta kondisi sosial masyarakat yang dinamis, tumbuhnya semangat gotong royong, partisipasi sehingga tingkat keswadayaan dalam pembangun desa semakin tahun-semakin meningkat. Hal ini tercermin dari struktur APBDes sejauh mana tingkat keswadayaan masyarakat terhadap total APBDes. Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendorong sasaran ini tercapai diantaranya:

- Peningkatan kapasitas LPM se Provinsi Riau
- Peningkatan Kapasitas Pengurus LAM se Riau
- Peningkatan Kapasitas Pengurus PKK se Provinsi Riau
- Bulan Bakti Gotong Royong Tingkat Provinsi Riau
- Gelar Teknologi Tepat Guna Provinsi dan Nasional

Pencapaian sasaran ini dilaksanakan secara sinergi dengan program kabupaten/kota dengan berbagai sasaran terutama masalah lokus yang menjadi sasaran kegiatan. Sedangkan kegiatan BBGRM dan TTG secara nasional dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, provinsi dan pusat.

2.3 Lembaga Kemasyarakatan

Pembangunan masyarakat pedesaan merupakan bagian dari pembangunan masyarakat yang diarahkan pula kepada pembangunan kelembagaan dan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan pada satuan wilayah pedesaan. Dibentuknya lembaga di setiap desa sebagai wujud partisipasi masyarakat desa akan mempercepat proses pembangunan desa. Hal ini dikarenakan masyarakat desa akan lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mereka karena tumbuh dan

berkembang dari masyarakat desa itu sendiri (*grassroot*). Program-program yang dicanangkan pemerintah akan disesuaikan dengan kondisi sekarang. Kondisi yang ada itu meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, prasarana dan sarana pembangunan, teknologi, kelembagaan, aspirasi masyarakat setempat dan lain sebagainya. Dikarenakan dana anggaran pembangunan yang tersedia di tiap desa terbatas sedangkan program pembangunan yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, maka perlu dilakukan penentuan prioritas program pembangunan yang diusulkan serta didukung oleh partisipasi masyarakat untuk menunjang implementasi program pembangunan tersebut. Jika diperhatikan dengan seksama, aturan main proses penyusunan program-program pembangunan yang dilakukan selama ini sesungguhnya merupakan mekanisme ideal, artinya berniat mengakomodasikan sebesar-besarnya aspirasi masyarakat (desa). Proses penyusunan program pembangunan dilakukan melalui tahapan-tahapan yang dimulai dari tingkat desa yaitu kegiatan musyawarah pembangunan desa, kemudian dibawa ke tingkat kecamatan melalui diskusi unit daerah kerja pembangunan. Demikian seterusnya hingga disalurkan di tingkat kabupaten/kota yang melibatkan lintas unit-unit kerja kabupaten/kota. Lembaga-lembaga yang terdapat di masyarakat berbeda dengan suatu organisasi atau asosiasi. Perbedaan tersebut ada pada tujuan pengaturannya, yaitu apabila pengaturan yang ada berorientasi pada tercapainya suatu tujuan maka pengaturan itu terkait dengan masalah organisasi tetapi apabila pengaturannya itu berorientasi pada suatu pemenuhan kebutuhan, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan sekunder, maka pengaturan itu berarti terkait dengan masalah kelembagaan.

Di dalam suatu masyarakat meskipun terdapat lebih dari satu lembaga biasanya terdapat satu lembaga yang berada dalam kedudukan teratas dan mendominasi lembaga-lembaga lainnya. Bagi masyarakat desa, lembaga-lembaga dominan ini bisa diwakili oleh lembaga adat maupun lembaga pemerintahan. Besarnya peranan lembaga pemerintahan itu berbeda pada semua desa. Pada desa dengan ikatan genealogis peranan lembaga pemerintahan ini tidak terlalu besar karena sistem kekerabatan dengan aturan adat istiadatnya sangat mendominasi kehidupan masyarakat desa sedangkan pada desa dengan ikatan kedaerahan peranan lembaga pemerintahan cukup besar. Perubahan dan perkembangan kelembagaan pada desa-desa di Indonesia ditentukan oleh kondisi internal maupun oleh pengaruh eksternal desa. Pengaruh eksternal terutama datang dari program-program pembangunan. Kondisi internal adalah semua potensi dan akses yang

dimiliki desa tersebut dan menjadi faktor penentu dalam beradaptasi terhadap proses sosial umum. Diferensiasi kelembagaan menjadi lebih berkembang setelah era pembangunan, dimana Pemerintah melalui berbagai departemennya semakin meningkatkan intervensinya terhadap proses perkembangan pembangunan desa.

Terkait dengan penguatan terhadap desa ada tiga hal pokok yang pertama adalah memperkuat dan mendayagunakan perangkat pemerintah lokal, karena tanpa itu tidak akan bisa jalan pemerintahannya. Yang kedua adalah memperkuat lembaga kemasyarakatan, karena melalui kelembagaan tersebut proses kegiatan pembangunan dimulai. Yang ketiga adalah masyarakat itu sendiri yang harus diperkuat dalam artian memberdayakannya.

Untuk menjaga proses penguatan lembaga kemasyarakatan, pemerintah telah menyediakan serangkaian regulasi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Sesuai dengan bunyi Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Kemudian berdasarkan Pasal 7 Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain, Lembaga Adat, Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, RT/RW, Karang Taruna; dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.

Penataan dan penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan sangat penting, terutama untuk meningkatkan kedudukan dan peran lembaga kemasyarakatan yang berfungsi sebagai mitra pemerintah desa dalam rangka pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Pembentukan lembaga kemasyarakatan di tengah-tengah kelompok masyarakat menjadi suatu media interaksi sosial kemasyarakatan serta dapat sebagai penyalur aspirasi masyarakat dalam intervensi terhadap kebijakan pemerintah. Kondisi saat ini

pada Tahun 2016 terdapat sekitar 55.840 lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang tersebar di 12 Kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Riau. Rincian jumlah lembaga kemasyarakatan tersebut disajikan pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 2.3
Data Lembaga Kemasyarakatan di Provinsi Riau pada Tahun 2016

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	JML LPMD /K	JML KEMAS. LAINNY	JML . RW	JML. RT	JML. KPM	JML POS YANDU	JML PKK	LBG ADAT	KARANG TARUNA	KET
1	PEKANBARU	58	12	607	2495	3005	607	59	1	58	-
2	BENGKALIS	155	8	674	1567	102	403	156	8	155	-
3	KUANSING	229	89	1330	1830	127	313	230	60	229	-
4	SIAK	131	14	827	1852	252	219	132	14	131	-
5	PELALAWAN	118	18	691	1837	90	118	119	13	118	-
6	KEP. MERANTI	101	80	443	1837	73	210	102	9	101	-
7	ROKAN HULU	150	10	1005	2507	377	150	164	16	150	-
8	ROKAN HILIR	186	15	1030	2867	314	186	187	1	186	-
9	KAMPAR	250	20	1672	4190	250	613	251	62	250	-
10	INDRAGIRI HILIR	237	103	1492	4819	512	237	238	237	237	-
11	INDRAGIRI HULU	194	119	996	2412	870	367	195	14	194	-
12	DUMAI	33	24	-	520	236	185	34	16	33	-
JUMLAH		1842	522	10767	28733	6208	3608	1867	451	1842	-

Dari data tersebut dapat dideskripsikan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan merupakan langkah yang baik dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat khususnya pada pemerintah desa. Langkah awal yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah provinsi salah satunya dengan melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas serta bimbingan teknis pada pengurus lembaga kemasyarakatan yang ada di Provinsi Riau.

Salah satu kegiatan fasilitasi dan penataan lembaga kemasyarakatan di Provinsi Riau pada tahun 2017 telah dilaksanakan Peningkatan Kapasitas Pengurus LPM se-Provinsi Riau. Kegiatan peningkatan kapasitas pengurus LPM se-Provinsi Riau ini diikuti 150 orang. Sasaran pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas lpm ini adalah untuk meningkatkan pemahaman pengurus LPM terampil menjadi inisiator dalam pengembangan konsep dan program pemberdayaan masyarakat di desa. Dengan demikian *outcome* yang diharapkan dari kegiatan ini pada akhirnya dalam rangka penyamaan persepsi antara pemerintah dengan

pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta mewujudkan sasaran prioritas SKPD dalam meningkatkan peran dan fungsi LPM menuju pembangunan masyarakat desa yang mandiri.

Lembaga Adat

Lembaga Adat menurut Pasal 95 Ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. Lembaga adat Desa bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

Lembaga hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan warga masyarakat hukum, terutama keputusan yang berwibawa dari kepala-kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum atau dalam hal kepentingan keputusan hakim yang bertugas mengadili sengketa. Sepanjang keputusan itu-keputusan itu tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, melainkan seiring dengan kesadaran tersebut, diterima/diakui atau setidaknya ditoleransikan. Lembaga hukum adat menjadi suatu perkumpulan masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sosial ekonomi, keagamaan dan berbagai hal sebagai bentuk keterwakilan suatu komunitas dalam pembangunan.

Tugas – tugas yang dilakukan oleh Lembaga Adat adalah tugas dan fungsinya yang terkait dengan upacara adat, penyelesaian konflik, belum menyentuh tugas-tugas dan fungsi yang secara praktis dapat mempengaruhi dalam peningkatan pendapatan masyarakat adat. Belum ada mekanisme yang transparan dalam penentuan lembaga adat. Sehingga tidak jelas apa syarat-syaratnya, siapa yang memilihnya, bagaimana penetapannya dan berapa lama masa bhaktinya, belum adanya penghargaan yang wajar terhadap kerja kerasnya melalui honorarium bulanan sebagaimana umumnya sebuah lembaga. Sehingga dapat diuraikan tugas-tugas lembaga adat itu antara lain:

1. Membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan.
2. Melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam desa adatnya
3. Memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial kepadatan dan keagamaan.
4. Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam rangka memperkaya, melestarikan

dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan.

5. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat desa adat.

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention For The Safe Guarding Of The Intangible Culture Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan budaya Tak Benda) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pelestarian dan Pengembangan adat istiadat dan nilai sosial Budaya Masyarakat dimaksudkan untuk memperkokoh jati diri individu dan masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Penekanan terhadap kebijakan tersebut, didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*indigenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, dan kelembagaan masyarakat lokal. Orientasi ini mengarahkan masyarakat adat kepada pengambilan inisiatif, prakarsa, dan kreativitas yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan dan jaminan sosial bagi masyarakat dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainability*) serta terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*).

Pada tahun 2017, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa provinsi riau telah melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas pengurus kerapatan adat dengan output meningkatnya pengetahuan pengurus kerapatan adat dalam rangka pelestarian adat melayu dan kearifan lokal. Kegiatan ini diikuti oleh 100 orang pengurus kerapatan adat se-Provinsi Riau. Selain itu juga dilakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Adat Istiadat dan Budaya Masyarakat di Provinsi Riau dalam rangka penyusunan database adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang terdapat di Provinsi Riau.

2. Meningkatnya efektifitas pelayanan, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pelayanan publik;

Sasaran ini menginginkan bahwa Pemerintah Desa bisa berperan dalam proses pemberdayaan, pembanguan dan pelayanan publik di perdesaan. Pada tahun 2017 Beberapa upaya yang dilakukan dalam mencapai sasaran ini, diantaranya meningkatkan kompetensi aparatur desa dengan berbagai kegiatan, diataranya:

1. Peningkatan Kapsitas Aparatur Desa sejumlah 950 orang kepala desa
2. Sosialisasi Peraturan dan perundang-undangan tentangdesa 50 orang aparatur

desa.

Dengan meningkatnya kompetensi aparatur desa, diharapkan proses penyelenggaraan pemerintah desa dapat terlaksana secara akuntabel. Sehingga peran yang diharapkan dapat tercapai. Peran pemerintah desa dalam pelaksanaan pembaguan dan pemberdayaan masyarakat yang ingin diwujudkan oleh Dinas PMD Provinsi Riau anatara lain:

a. Pemerintah Desa sebagai Regulator

Peran Pemerintah sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan). Sebagai regulator, pemerintah Desa memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan di masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dari segi ekonomi akan dikaitkan dengan kebijakan yang mendukung dalam pengembangan usahanya. Adapun kebijakan yang diarahkan yakni kebijakan dibidang permodalan guna mendukung kegiatan usaha masyarakat dan dianggarkan dari APBN/APBD dan kebijakan di bidang perizinan pendirian usaha untuk mempermudah proses perizinan menjadi lebih efektif dan efisien.

b. Pemerintah Desa sebagai Dinamisator

Peran pemerintah Desa sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi multipihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan Desa). Sebagai dinamisator, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam memelihara dinamika. Pemerintah melalui tim penyuluh maupun badan tertentu memberikan bimbingan maupun pelatihan kepada masyarakat.

c. Pemerintah Desa sebagai Fasilitator;

Peran pemerintah Desa sebagai Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan Desa). Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk

memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan. Fasilitas dalam UKM misalnya, pemerintah memberikan fasilitas untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh UKM.

Tabel. 2.4
Rincian Data Pembagian Wilayah Administratif Provinsi Riau

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	KELURAHAN	JUMLAH
1	BENGKALIS	8	136	19	155
2	INDRAGIRI HILIR	20	198	39	237
3	INDRAGIRI HULU	14	178	16	194
4	KAMPAR	21	242	8	250
5	KEP.MERANTI	9	96	5	101
6	KUANTAN SINGINGI	15	218	11	229
7	PELALAWAN	12	104	14	118
8	ROKAN HILIR	15	159	25	184
9	ROKAN HULU	16	139	6	145
10	SIAK	14	122	9	131
11	DUMAI	7	0	33	33
12	PEKANBARU	12	0	58	58
JUMLAH TOTAL		163	1.592	243	1.835

Tabel 2.5
Tipologi Desa/ Kelurahan di Provinsi Riau

NO	TIPOLOGI	SWADAYA	SWAKARYA	SWASEMBADA
1	Kehutanan	13	2	1
2	Perindustrian/Jasa	73	11	4
3	Perkebunan	27	2	0
4	Perladangan	561	116	29
5	Persawahan	54	3	0
6	Pertambangan	9	3	2
7	Pesisir/Nelayan	132	10	0
8	Peternakan	7	1	0
9	Tidak Terdefinisi	6	0	0
JUMLAH TOTAL		882	148	36

3. Peningkatan Kemandirian Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa melalui pemanfaatan Potensi Masyarakat, Pengembangan Kawasan Perdesaan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;

Kinerja sasaran ini mempunyai target memandirikan lembaga ekonomi desa sehingga bisa berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan dan

pembangunan di perdesaan. Lembaga Ekonomi desa yang menjadi sasaran pembinaan Dinas PMD Provinsi Riau adalah:

- a) Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
- b) Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek).
- c) Pasar Desa;

a. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);

BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jumlah Desa di Provinsi Riau menurut PERMENDAGRI NO.56/2015 sebanyak 1.592 desa, dari 1.592 desa di Provinsi Riau telah terbentuk BUMDesa sebanyak 708 desa dan yang belum terbentuk BUM Desa sebanyak 884 desa, dapat dilihat pada Tabel 7 dibawah ini :

Tabel 2.6 Data Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Tahun 2017 di Provinsi Riau

No.	Kabupaten	Jumlah Desa (PERMENDAGRI NO.56/2015)	Jumlah BUM Desa yang Terbentuk	Belum Terbentuk
1	Kampar	242	181	61
2	Indragiri Hulu	178	14	164
3	Bengkalis	136	136	0
4	Indragiri Hilir	198	36	162
5	Pelalawan	104	53	51
6	Rokan Hulu	139	136	3
7	Rokan Hilir	159	0	159
8	Siak	122	117	5
9	Kuantan Singingi	218	15	203
10	Kepulauan Meranti	96	20	76
	TOTAL RIAU	1.592	708	884

b. Pasar Desa

Berdasarkan data yang telah dihimpun oleh Bidang Pembangunan Masyarakat Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan dan Pembangunan Desa Provinsi Riau tahun 2017 terdapat 786 Pasar Desa se Provinsi Riau. Dari sekian banyak yang telah diberikan bimbingan teknis pengelolaan pasar desa baru sebanyak 125 desa. Sedangkan desa yang belum pasar desa berjumlah 806 desa. Kondisi ini memerlukan kebijakan pemerintah guna menstimulus pertumbuhan pasar desa yang ada diprovinsi riau.

c. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Di Provinsi Riau

Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) di Provinsi Riau cukup berkembang dengan baik. Pada Lomba Posyantek Tingkat Nasional Tahun 2017 Riau berhasil meraih prestasi sebagai Juara Harapan II Tingkat Nasional. Gubernur Riau juga mendapatkan Penghargaan dari Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi RI atas pembinaan dalam pengembangan TTG di Provinsi Riau.

Saat ini berdasarkan data yang dilansir oleh Bidang TTG Dinas PMD Provinsi Riau Tahun 2017 terdapat 152 Posyantek yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau. Secara umum tiap tiap kabupaten/kota memiliki Posyantek Unggulan. Tetapi masih banyak posyantek yang memerlukan dukungan dan pembinaan dari pemerintah.

2.4 Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Tugas pokok dan fungsi dinas pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah/ kewenangan Provinsi dibidang Kesekretariatan, Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Fungsi dinas pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu:

1. Penyelenggaraan Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
2. penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
3. Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
4. Penyelenggaraan tugas-tugas pembantuan pemerintahan dibidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
5. Penyelenggaraan pelayanan administrasi internal dan eksternal.
6. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dari analisa faktor Internal dan eksternal maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain :

- 1) Teknologi informasi yang menuntut kesiapan SDM yang handal dan professional dalam berbagai pelaksanaan tupoksi perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pengembangan program/ kegiatan.
- 2) Pelaksanaan koordinasi yang membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh komponen dalam rangka strategis pelaksanaan program/ kegiatan.
- 3) Kebijakan pemerintah yang menimbulkan dampak yang kurang mendukung terhadap capaian kinerja program/ kegiatan.

- 4) Peraturan perundang-undangan yang belum dilengkapi dengan peraturan teknis sebagai penjabaran pelaksanaan tugas.
- 5) Belum semua desa memiliki kantor desa yang ideal sebagai sarana dan prasarana utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 6) Masih sedikit desa-desa yang mengembangkan kerjasama desa dalam rangka meningkatkan dan menguatkan otonomi desa. Ditambah lagi dengan minimnya infrastruktur pedesaan.
- 7) Rendahnya kemampuan masyarakat dalam memasyarakatkan dan mendayagunakan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta penyediaan berbagai informasi dan teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat masih sangat terbatas.

Adapun berbagai tantangan kedepan yang perlu diantisipasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dalam pencapaian program prioritas, antara lain:

- 1) Dalam mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan desa/kelurahan dalam rangka pemberian pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat relatif terbatasnya.
- 2) Kinerja Lembaga kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan masih rendah dalam mendorong peran aktif masyarakat guna mengelola program-program pembangunan dalam rangka mewujudkan ketahanan masyarakat, termasuk masih rendahnya kemampuan sumber daya manusia di pedesaan, seperti Kader Pemberdayaan Masyarakat, Kader PKK dan Kader Posyandu.
- 3) Kecenderungan menurunnya peranan dan fungsi lembaga adat sebagai penegak sistem nilai sosial budaya dalam kehidupan masyarakat lokal, sehingga memerlukan upaya pemantapan nilai-nilai sosial budaya masyarakat sesuai tradisi dan ada istiadat setempat seperti budaya gotong royong sebagai pedoman sikap dan perilaku masyarakat dalam kehidupan bersama.
- 4) Semakin menurunnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat dengan berkembangnya berbagai jenis penggunaan obat-obatan terlarang, dan masalah sosial kemasyarakatan lainnya, dapat berdampak pada menurunnya kualitas sumberdaya manusia Indonesia. Untuk itu, perlu diupayakan pemenuhan hak-hak dasar penduduk, seperti kesehatan dan pendidikan serta peningkatan pendapatankeluarga dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan keluarga.

- 5) Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan, karena terbatasnya akses masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam lokal.

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Provinsi Riau dalam Penanggulangan kemiskinan dan sinergitas program dengan Pemerintah Pusat terkait dengan percepatan penanggulangan kemiskinan. Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD 2014- 2019 dan Perubahan Renstra SKPD 2014-2019. Selengkapnya sebagaimana tabel terlampir.

Tabel T-C. 31.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Provinsi Riau

Unit Organisasi: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				8,882,560,000	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				11,230,000,000	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	100 Persen	2,116,290,000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	100 Persen	2,693,685,000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau	Jumlah Surat yang dikirim	35 Surat/Dokumen	10,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau	Jumlah Surat yang dikirim	35 Surat/Dokumen	10,000,000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau	Rentang waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12 bulan	240,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau	Rentang waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12 bulan	324,000,000	
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	11 mobil dinas	192,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	11 mobil dinas	192,000,000	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	320,000,000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	341,340,000	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau	Rentang waktu penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	105,000,000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau	Rentang waktu penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	110,585,000	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rentang Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	110,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rentang Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	59,436,000	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rentang waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	40,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rentang waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	40,000,000	
8	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rentang waktu Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	42,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rentang waktu Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	35,400,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah makanan dan minum yang di sediakan	10353 Porsi	130,000,000	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah makanan dan minum yang di sediakan	10353 Porsi	170,570,000	
10	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100 kali	583,000,000	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100 kali	779,194,000	
11	Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rentang Waktu Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi dan kehumasan	12 Bulan	195,000,000	Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rentang Waktu Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi dan kehumasan	12 Bulan	476,000,000	
	Penyediaan Jasa Tenaga Operator Komputer	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah tenaga operator yang diperkerjakan	15 Orang							
12	Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rentang waktu Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor	12 bulan	149,290,000	Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rentang waktu Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor	12 bulan	155,160,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja	100 Persen	356,160,000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja	100 Persen	2,341,599,000	
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	49 Unit	67,000,000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	49 Unit	270,400,000	
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	53 unit	73,160,000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	53 unit	473,699,000	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	55 Unit	17,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	55 Unit	27,500,000	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	84 Unit	15,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	84 Unit	30,000,000	
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah gedung kantor yang direhab	1 unit	150,000,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah gedung kantor yang direhab	1 unit	1,500,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah pemeliharaan terhadap gedung kantor	84 X pemeliharaan							
7	Penyediaan Sarana Kearsipan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah sarana kearsipan	11 unit	34,000,000	Penyediaan Sarana Kearsipan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah sarana kearsipan	11 unit	40,000,000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	100 Persen	107,990,000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	100 Persen	142,300,000	
1	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	12 orang	90,000,000	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	12 orang	115,000,000	
2	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah ASN yang mengikuti Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur senam dan pengajian	100 orang	17,990,000	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah ASN yang mengikuti Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur senam dan pengajian	100 orang	27,300,000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase ketepatan penyampaian laporan	100 Persen	451,350,000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase ketepatan penyampaian laporan	100 Persen	325,450,000	
1	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Dokumen Renja SKPD yang disusun	1 dokumen	46,000,000	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Dokumen Renja SKPD yang disusun	1 dokumen	38,850,000	
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulan, Semesteran dan Akhir Tahun	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah pelaporan Keuangan, Triwulan, Semesteran dan Akhir Tahun	3 Laporan	119,350,000	Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulan, Semesteran dan Akhir Tahun	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah pelaporan Keuangan, Triwulan, Semesteran dan Akhir Tahun	3 Laporan	119,000,000	
3	Penyusunan rencana strategis (RENSTRA) SKPD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Dokumen Renstra SKPD yang disusun	1 dokumen	65,000,000	Penyusunan rencana strategis (RENSTRA) SKPD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Dokumen Renstra SKPD yang disusun	1 dokumen	50,000,000	
4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan SKPD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil program/kegiatan	1 Dokumen	221,000,000	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan SKPD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil program/kegiatan	1 Dokumen	117,600,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		Persentase Tingkat Swadaya Masyarakat Dalam Pembangunan (dari Total Pendapatan Desa)	0,1 Persen	2,947,860,000	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		Persentase Tingkat Swadaya Masyarakat Dalam Pembangunan (dari Total Pendapatan Desa)	0,1 Persen	2,980,694,100	
1	Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BB-GRM) Tk. Provinsi	Se Provinsi Riau	Jumlah kab/kota yang mengikuti bulan bakti gotong royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Provinsi Riau	12 kabupaten/kota	400,000,000	Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BB-GRM) Tk. Provinsi	Se Provinsi Riau	Jumlah kab/kota yang mengikuti bulan bakti gotong royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Provinsi Riau	12 kabupaten/kota	400,000,000	
2	Peningkatan Kapasitas Pengurus LPM	Pekanbaru	jumlah pengurus LPM yang mengikuti peningkatan kapasitas	50 orang	250,000,000	Peningkatan Kapasitas Pengurus LPM	Pekanbaru	jumlah pengurus LPM yang mengikuti peningkatan kapasitas	50 orang	250,000,000	
3	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (PKK)	Se Provinsi Riau	Jumlah pengurus yang dibina mengikuti peningkatan kapasitas	570 orang	1,112,000,000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (PKK)	Se Provinsi Riau	Jumlah pengurus yang dibina mengikuti peningkatan kapasitas	570 orang	1,122,800,000	
4	Pemasyarakatan dan Penguatan Kelembagaan PAMSIMAS	Pekanbaru	Jumlah Pengurus Pengelola BP SPAMS yang mengikuti penguatan kapasitas	60 orang	200,000,000	Pemasyarakatan dan Penguatan Kelembagaan PAMSIMAS	Pekanbaru	Jumlah Pengurus Pengelola BP SPAMS yang mengikuti penguatan kapasitas	60 orang	200,000,000	
5	Peningkatan Kapasitas Pengurus Lembaga Adat Melayu Se- Provinsi Riau	Pekanbaru	Jumlah Pengurus Lembaga Adat yang mengikuti Peningkatan Kapasitas	100 orang	350,000,000	Peningkatan Kapasitas Pengurus Lembaga Adat Melayu Se- Provinsi Riau	Pekanbaru	Jumlah Pengurus Lembaga Adat yang mengikuti Peningkatan Kapasitas	100 orang	350,000,000	
6	Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah Kabupaten/Kota Yang mengikuti Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Riau	12 Kab/Kota							
7	Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional	Provinsi Bengkulu	Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi dalam Gelar TTG Tingkat Nasional	12 kab	387,860,000	Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional	Provinsi Bengkulu	Jumlah Kab/Kota yang mengikuti kegiatan Gelar TTG	12 kab	400,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Peningkatan Pelayanan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM)	Pekanbaru	Jumlah kab/kota yang di bina dan mendapatkan peningkatan pelayanan unit pengaduan masyarakat (UPM)	12 kab/kota	110,000,000	Peningkatan Pelayanan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM)	Pekanbaru	Jumlah kab/kota yang di bina dan mendapatkan peningkatan pelayanan unit pengaduan masyarakat (UPM)	12 kab/kota	119,334,100	
9	Pembinaan Administrasi Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Se- Provinsi Riau/ Pendamping Desa	Pekanbaru	Jumlah Kabupaten yang mendapatkan pembinaan administrasi pendampingan desa	10 Kabupaten	138,000,000	Pembinaan Administrasi Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Se- Provinsi Riau/ Pendamping Desa	Pekanbaru	Jumlah Kabupaten yang mendapatkan pembinaan administrasi pendampingan desa	10 Kabupaten	138,560,000	
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan Yang Berkembang (BUMDes, Pasar Desa dan POSYANIEK)	BUMDes : 50 ; Pasar Desa : 50 ; POSYANIEK : 30	828,220,000	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan Yang Berkembang (BUMDes, Pasar Desa dan POSYANIEK)	BUMDes : 50 ; Pasar Desa : 50 ; POSYANIEK : 30	532,877,000	
1	Bimbingan Teknis Pengelolaan Pasar Desa se- Provinsi Riau	Pekanbaru	Jumlah Pengelola Pasar Desa yang mengikuti BIMTEK	20 desa	346,000,000	Bimbingan Teknis Pengelolaan Pasar Desa se- Provinsi Riau	Pekanbaru	Jumlah Pengelola Pasar Desa yang mengikuti BIMTEK	20 desa	200,000,000	
2	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan BUMDes Se- Provinsi Riau	Pekanbaru	Jumlah Pengurus BUM Desa yang di Bina	50 orang	350,220,000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan BUMDes Se- Provinsi Riau	Pekanbaru	Jumlah Pengurus BUM Desa yang di Bina	50 orang	200,000,000	
3	Pemetaan Pembangunan Kawasan Pedesaan	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Pemetaan Pembangunan Kawasan Pedesaan	1 Dokumen	132,000,000	Pemetaan Pembangunan Kawasan Pedesaan	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Pemetaan Pembangunan Kawasan Pedesaan	1 Dokumen	132,877,000	
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Akuntabel (%)	35 Persen	2,074,690,000	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Akuntabel (%)	35 Persen	2,213,394,900	
1	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah aparatur desa yang mengikuti pelatihan manajemen pemerintahan desa	50 orang	150,000,000	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah aparatur desa yang mengikuti pelatihan manajemen pemerintahan desa	50 orang	150,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Penyusunan Data Profil Desa/Kelurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah desa /kel yang di fasilitasi dalam rangka penguatan Profil desa dan kelurahan	10 Desa / 12 Kelurahan	100,000,000	Penyusunan Data Profil Desa/Kelurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah desa /kel yang di fasilitasi dalam rangka penguatan Profil desa dan kelurahan	10 Desa / 12 Kelurahan	100,000,000	
3	Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Pengurus BPD yg mengikuti Peningkatan Kapasitas dan terpilihnya BPD Terbaik tingkat Provinsi Riau	40 Orang, 3 BPD Terbaik	250,000,000	Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Pengurus BPD yg mengikuti Peningkatan Kapasitas dan terpilihnya BPD Terbaik tingkat Provinsi Riau	40 Orang, 3 BPD Terbaik	250,000,000	
4	Bimbingan Teknis Penyusunan RPJMDes dan RKPDes Bagi Aparatur Desa se- Provinsi Riau	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Aparatur Desa yang mendapatkan BIMTEK Penyusunan RPJMDes dan RKPDes	50 orang	212,000,000	Bimbingan Teknis Penyusunan RPJMDes dan RKPDes Bagi Aparatur Desa se- Provinsi Riau	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Aparatur Desa yang mendapatkan BIMTEK Penyusunan RPJMDes dan RKPDes	50 orang	232,729,000	
5	Pembinaan Terhadap Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penataan Wilayah Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	jumlah kabupaten/kota yang di fasilitasi dalam rangka penataan Desa/Keluahan	12 kab/kota	75,690,000	Pembinaan Terhadap Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penataan Wilayah Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	jumlah kabupaten/kota yang di fasilitasi dalam rangka penataan Desa/Keluahan	12 kab/kota	75,000,000	
6	Rapat Kerja Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Pekanbaru	Jumlah peserta Rapat Kerja Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	156 orang	175,000,000	Rapat Kerja Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Pekanbaru	Jumlah peserta Rapat Kerja Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	156 orang	175,000,000	
7	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Provinsi Riau	Pekanbaru	Jumlah Peserta Aparatur desa yang mengikuti bimtek	100 orang	220,000,000	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Provinsi Riau	Pekanbaru	Jumlah Peserta Aparatur desa yang mengikuti bimtek	100 orang	227,079,100	
8	Bimbingan Teknis Manajemen Aset Desa	Pekanbaru	Jumlah Peserta Aparatur desa yang mengikuti bimtek manajemen aset desa	90 orang	202,000,000	Bimbingan Teknis Manajemen Aset Desa	Pekanbaru	Jumlah Peserta Aparatur desa yang mengikuti bimtek manajemen aset desa	90 orang	208,717,200	
9	Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Se Provinsi Riau	Jumlah Desa dan Kelurahan yang di evaluasi perkembangannya sesuai dengan kategori penilaian	10 Desa dan 12 Kelurahan	274,000,000	Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Se Provinsi Riau	Jumlah Desa dan Kelurahan yang di evaluasi perkembangannya sesuai dengan kategori penilaian	10 Desa dan 12 Kelurahan	350,000,000	
10	Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa	Se Provinsi Riau	Jumlah Laporan Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	1 Dokumen	74,000,000	Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa	Se Provinsi Riau	Jumlah Laporan Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	1 Dokumen	76,885,800	
11	Peningkatan Kapasitas Pendamping Profesional Desa Se- Provinsi Riau	Pekanbaru	Jumlah Pendamping Profesional Desa yang mengikuti Pelatihan	147 orang	342,000,000	Peningkatan Kapasitas Pendamping Profesional Desa Se- Provinsi Riau	Pekanbaru	Jumlah Pendamping Profesional Desa yang mengikuti Pelatihan	147 orang	367,983,800	

Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa ada beberapa kegiatan yang mengalami kenaikan itu disebabkan karena kebutuhan yang bertujuan untuk mewujudkan visi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Nawa Cita presiden republik Indonesia yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan apalagi tahun 2019 merupakan sebagai batas akhir RENSTRA yang telah dibuat sebelumnya, jadi untuk mewujudkan semua itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu mendapatkan tambahan anggaran.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Presiden RI terpilih Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang memuat arah kebijakan, target serta strategi pembangunan nasional tahun 2015-2019. Di dalam dokumen rencana tersebut juga memuat indikator-indikator pembangunan beserta sasarnya berdasarkan *exercise* pagu indikatof jangka menengah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. Dengan berpayung kepada RPJP tadi, RPJMN 2015-2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (Nawa Cita) Presiden/ Wakil Presiden, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla, dengan menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas dan berpedoman pada RPJPN 2005-2025.

AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL

Visi dan Misi Pembangunan Nasional

RPJMN 2015-2019 telah menetapkan visi pembangunan Indonesia adalah **“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”**.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan

demokratis berlandaskan negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sembilan Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA)

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Agenda Kebangkitan Indonesia (TRISAKTI)

“Trisakti” adalah konsep paradigma yang dikemukakan oleh Bung Karno dalam rangka membangkitkan kembali Indonesia menjadi bangsa yang besar secara politik maupun ekonomi. Menurutnya tiga paradigma yang akan mampu membangkitkan Indonesia menjadi bangsa yang besar, baik secara politik maupun ekonomi. Konsep tiga paradigma tersebut dinamakan dengan “Trisakti” atau tiga kekuatan yang berfungsi sebagai kesaktian bangsa.

Trisakti yang dimaksudkan Bung Karno adalah, pertama, **“Berdaulat dalam Politik”**. Sehingga Bung Karno menegaskan bahwa kedaulatan politik bangsa Indonesia sudah mutlak untuk diwujudkan dengan menolak segala bentuk intervensi bangsa lain. Bung Karno menyatakan, *“nation building”* dan *“character building”* harus diteruskan sehebat-hebatnya demi menunjang kedaulatan politik kita.

Kedua, **“Berdikari dalam Ekonomi”**. Bung Karno mengingatkan kita betapa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang kaya dengan sumber daya alam (SDA) baik di daratan maupun di laut. Akan tetapi kekayaan SDA ini belum mampu membangkitkan ekonomi nasional dikarenakan tingkat ketergantungan terhadap pranata ekonomi asing masih sangat tinggi. Dengan melihat fakta ini maka Bung Karno mengemukakan bahwa penting sekali bangsa Indonesia untuk “berdiri di atas kaki sendiri” (berdikari) dalam mengatur perekonomian demi kesejahteraan rakyat. Ketergantungan yang tinggi terhadap ekonomi bangsa lain menurut Bung Karno tidak akan menjamin kesejahteraan rakyat, bahkan justru sebaliknya berpotensi menimbulkan resesi ekonomi nasional yang berkepanjangan. Apa yang menjadi kekhawatiran Bung Karno ini ternyata terbukti, terutama ketika bangsa Indonesia pada era Orde Baru mulai berafiliasi dengan lembaga keuangan internasional seperti IMF dan lain-lainnya, sehingga bangsa Indonesia tidak bisa menghindarkan diri dari krisis ekonomi yang dampaknya terasa hingga hari ini.

Ketiga, **“Berkepribadian dalam Kebudayaan”**. Aspek budaya bagi Bung Karno sama pentingnya dengan aspek lainnya. Bangsa Indonesia harus menghormati budaya warisan nenek moyang dan menghargai nilai-nilai luhur kebudayaan di masyarakat. Karakter dan

kepribadian budaya positif Nusantara haruslah dijaga dan dilestarikan. Misalnya budaya gotong-royong yang melambangkan kolektifitas sebuah komunitas yang guyub, maupun berbagai karya budaya adiluhung yang mewarnai dunia seni Indonesia.

Konsep tersebut dijabarkan ke dalam batang tubuh RPJMN 2015-2019 dalam bentuk 3 agenda perubahan Indonesia berupa:

- 1) Berdaulat dalam Politik (dijabarkan dalam 12 Program Aksi dan Prioritas Utama) dengan sasaran utama:
 - Pembangunan demokrasi politik
 - Kedaulatan rakyat menjadi karakter, nilai, dan semangat yang dibangun melalui gotong royong
- 2) Berdikari dalam Ekonomi (dijabarkan dalam 16 Program Aksi) dengan sasaran utama:
 - Rakyat sebagai pemegang kedaulatan keuangan negara dan pelaku utama pembentukan produksi dan distribusi nasional
 - Pemenuhan hak dasar rakyat
- 3) Kepribadian dalam kebudayaan (dijabarkan berupa 3 Program Aksi) dengan sasaran utama:
 - Pembangunan karakter dan kegotongroyongan
 - Kebhinekaan dan kemaritiman sebagai potensi bangsa untuk demokrasi politik dan demokrasi ekonomi

Sebagai perwujudan nawacita ke-3 yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan adalah memperkuat implementasi UU 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu dengan mengalokasikan Dana Desa melalui APBN, dengan didampingi oleh tenaga Pendamping Desa yang telah dimulai sejak tahun 2014 yang lalu. Berikut Tabel Roadmap Dana Desa;

Tabel 3.1
Roadmaap Dana Desa

No	Tahun	Total
1	2015	Dana Desa(DD):Rp20.766,2 M Rata-rata DD per Desa: Rp 280,3 juta ADD: Rp32.666,4M BagiHasilPDRD: Rp2.091,0 M TOTAL= Rp55.523,6M Rata2 perdesa: Rp749,4juta
2	2016	Dana Desa(DD): Rp46.982,1M Rata-rata DD per Desa: Rp 628,5 juta ADD: Rp36.723,9M BagiHasilPDRD: Rp2.650,4M TOTAL= Rp86.356,4M Rata2 perdesa: Rp1.115,2juta
3	2017	Dana Desa(DD): Rp89.000 M Rata-rata DD per Desa: Rp 1.080,7 juta ADD: Rp42.285,9M BagiHasilPDRD: Rp2.733,8M TOTAL= Rp134.019,7 M Rata2 perdesa: Rp1.792,8 juta
4	2018	Dana Desa(DD):Rp103.791,1M Rata-rata DD per Desa: Rp 1.400,8 juta ADD: Rp55.939,8M BagiHasilPDRD: Rp3.055,3M TOTAL= Rp162.786,3M Rata2 perdesa: Rp2.197,1 juta
5	2019	Dana Desa(DD): Rp111.840,2 M Rata-rata DD per Desa: Rp 1.509,5 juta ADD:Rp60.278,0M BagiHasilPDRD: Rp3.376,7M TOTAL= Rp175.494,9 M Rata2 perdesa:Rp2.368,6juta

Sumber:Kementerian Keuangan, 2017

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD 2019

Tahun 2019 merupakan tahun k-5 perjalanan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau periode tahun 2014 – 2019, maka tujuan dan sasaran RENJA SKPD adalah :

Tujuan renja OPD Tahun 2019 kembali memperkuat capaian kinerja yang ingin dicapai dalam periode waktu 2014-2019, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan partisipasi masyarakat,tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat, pelestarian adat istiadat dan budaya lokal yang maju dan dinamis dalam pembangunan desa/kelurahan;
2. Meningkatkan efektifitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan

- desa dan pemerintahan kelurahan dalam proses penyelenggaraan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik;
3. Meningkatkan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dan Kelurahan;
 4. Mengembangkan pengelolaan sumberdaya alam yang efektif dan efisien dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna;
 5. Meningkatkan dan Memantapkan Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan, Perlengkapan serta Kepegawaian dan Umum;

Sedangkan sasaran merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam jangka waktu 5 tahun. Adapun sasaran Renja tahun 2019 adalah juga memperkuat capaian sasaran renstra OPD Dinas PMD dengan prioritas sasaran sebagai berikut :

1. Pengembangan Ekonomi Pedesaan melalui BUMDes, Pembangunan Desa Kawasan;
2. Memperkuat Kapasitas Pemerintah Desa, BPD serta Aparatur PMD Kecamatan;
3. Kembali memperkuat SDM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, PKK, LAM sebagai dalam upaya meperkuat ketahan sosial dapatisipasi masyarakat dalam pemebangan di pedesaaan;
4. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam berwawasan lingkungan dengan mendayagunakan Teknologi Tepat Guna (TTG);
5. Meningkatnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan, Perlengkapan serta Kepegawaian dan Umum;

Rumusan sasaran perirotas tersebut akan digamabarkan dalam rencana kerja (renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi tahun 2019 disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Riau (RKP) tahun 2019 dengan agenda menyelesaikan rencana dan permasalahan yang belum seluruhnya tertangani sampai tahun 2018 serta rencana dan permasalahan yang akan dihadapi tahun 2019.

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Di dalam proses rencana kerja, Bappeda Provinsi Riau mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program

dan Kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Bappeda Provinsi Riau untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolok ukur (benchmarks) bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Faktor-faktor yang menjadi bahan rumusan pada rencana kerja tahun 2019 pada Dinas PMD Provinsi Riau berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis yang terdapat dalam Renstra Dinas PMD Provinsi Riau 2014-2019, yang terdiri dari;

1. Meningkatkan Kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan ,partisipasi masyarakat dan tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat, pelestarian adat istiadat dan budaya lokal yang maju dan dinamis dalam pembangunan desa/kelurahan;
2. Meningkatnya efektifitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan dalam proses penyelenggaraan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik;
3. Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Usaha Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam berwawasan lingkungan dengan mendayagunakan Teknologi Tepat Guna (TTG);
5. Meningkatnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan, Perlengkapan serta Kepegawaian dan Umum;

Dalam mencapai sasaran strategis ini terdapat 9 program yang dirumuskan dalam rencana kerja tahun 2019 yaitu;

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
8. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
9. Program Pengembangan Data/Informasi

Adapun rincian rencana kegiatan per program Dinas PMD Provinsi Riau Tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel berikut;

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja Dinas PMD
Provinsi Riau Tahun 2019

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1	URUSAN WAJIB	
A	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	
I	Program Pengembangan Data/Informasi	
1	Pembuatan Sistem Data dan Informasi Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau	Jumlah Sistem Data dan Informasi
B	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
II	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik
3	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat/dokumen untuk keperluan internal dan eksternal instansi
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang di Sediakan
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan Alat-alat listrik
7	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah surat kabar dan perundang-undangan yang disediakan
8	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah penyediaan makan & minum rapat dan tamu
9	Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan yang diperkerjakan
10	Penyediaan Jasa Tenaga Operator Komputer	Jumlah tenaga operator yang diperkerjakan
11	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah ASN PMD yang mengikuti rapat koordinasi dan rapat kerja program Dinas PMD serta melaksanakan koordinasi/konsultasi

12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah telp dan listrik yang harus dibayar
13	Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD	Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan informasi program/kegiatan Dinas PMD melalui publikasi, sosialisasi dan kehumasan di media (cetak, online, audiovisual dll)
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Mobil Dinas yang dirawat dan diperpanjang izin
15	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat kebersihan & honor tenaga kebersihan (CS) kantor
III	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung/kantor
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung/kantor
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan terhadap gedung kantor
19	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah paket Rehab gedung kantor
20	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah unit Pengadaan peralatan
21	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan
IV	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur
22	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya untuk ASN BPMP Bangdes Prov.Riau
23	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Terlaksananya pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu untuk ASN BPMP BAngdes Prov.Riau
V	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara
24	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan & Pelatihan Formal
25	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Telaksananya Senam kesehatan Jasmani dan pengajian agama beserta kosumsinya untuk ASN di BPMP Bangdes Prov.Riau
VI	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan penyampaian laporan

26	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja
27	Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulan, Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan
28	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah Dokumen Renja
29	Rapat Koordinasi pada setiap SKPD	Jumlah Aparatur PMD Kab & Kota yang mengikuti Rakornis
30	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan SKPD	Dokumen Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan dan Hasil Program/Kegiatan
31	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD	Jumlah Dokumen Renstra OPD
VII	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase tingkat swadaya masyarakat dalam pembangunan (dari Total Pendapatan Desa)
32	Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat Melayu (LAM) se Provinsi Riau	Jumlah Pengurus Lembaga Adat yang mengikuti Peningkatan Kapasitas
33	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (PKK)	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (PKK) yang dibina
34	Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Riau	Jumlah Kabupaten/Kota Yang mengikuti Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Riau
35	Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional	Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi dalam Gelar TTG Tingkat Nasional
36	Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Riau	Jumlah Peserta yang mengikuti Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Riau
37	Peningkatan Pelayanan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM)	Jumlah Kab/kota yang dibina dan mendapatkan peningkatan pelayanan unit pengaduan masyarakat (UPM)
38	Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BB-GRM) Tk. Provinsi	Jumlah kab/kota yang mengikuti Bulan Bakti Gortong Royong Masyarakat (BBGRM) Tk. Provinsi
39	Peningkatan Kapasitas LPM se Provinsi Riau	Jumlah pengurus LPM yang mengikuti peningkatan kapasitas
40	Pembinaan Administrasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) se Provinsi Riau/Pendamping Desa	Cakupan Pembinaan Administrasi Program P3MD Provinsi Riau
41	Pemetaan Pembangunan Desa Kawasan Provinsi Riau	Jumlah Peta tematik Pembangunan Desa Kawasan
VIII	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah lembaga ekonomi pedesaan yang berkembang (BUMDes, Pasar Desa dan Posyantek)
42	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan BUMDes Se- Provinsi Riau	Jumlah pengurus yang mendapatkan pembinaan pengelolaan BUMDes se Provinsi Riau

43	Bimbingan Teknis Pengelolaan Pasar Desa se-Provinsi Riau	Jumlah Pengelola Pasar Desa yang mengikuti BIMTEK
44	Peningkatan Kapasitas Posyantek	Jumlah aparatur / Pengurus Posyantek yang mengikuti peningkatan kapasitas
45	Pengembangan BUMDes Mandiri Provinsi Riau	Jumlah BUMDes Mandiri di fasilitasi
46	Pengembangan UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Provinsi Riau	Jumlah UPK yang di fasilitasi
47	Pembinaan dan Pengembangan POSYANTEK	Jumlah Posyantek Kab/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Fasilitasi
IX	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah penyelenggaraan pemerintahan desa yang akuntabel (%)
48	Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/kel yang dievaluasi berdasarkan permendagri 81 tahun 2015
49	Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Jumlah anggota BPD yang mengikuti pelatihan
50	Raker Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Jumlah peserta rapat kerja aparatur desa/kelurahan dan BPD pada 12 Kab/Kota di Provinsi Riau
51	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintah Desa	Jumlah aparatur desa yang mengikuti pelatihan manajemen pemerintahan desa
52	Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Bagi Aparatur Desa Provinsi Riau	Jumlah Aparatur PMD Kecamatan dan Desa yang mengikuti BIMTEK
53	Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa se-Provinsi Riau	Jumlah Peserta BIMTEK
54	Bimtek Pengelolaan Aset Desa se-Provinsi Riau	Jumlah Peserta BIMTEK
55	Monitoring dan Evaluasi Pengelolan Dana Desa, ADD dan Bantuan Keuangan Provinsi Riau	Jumlah Desa yang di Monev di 10 Kab
56	Pengutan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah Kabupaten yang difasilitasi dalam pedayagunaan Profil Desa
57	Bimbingan Teknis PTPD (Pembinaan Teknis Pemerintahan Desa)	Jumlah Aparat Kecamatan dan PMD yang mendapatkan Workshop PTPD
58	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Desa	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Desa

Rencana Pendanaan Program/Kegiatan

Sedangkan pendanaan Program kegiatan tersebut bersumber dari APBD Provinsi Riau tahun 2019, dengan rincian masing-masing indikasi kebutuhan dana masing-masing program sebagaimana tergambar dalam tabel berikut.

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
dan Perkiraan Maju Tahun 2020
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
5.1	BELANJA DAERAH				21.857,763,888.00				24,818,108,347.00
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				12,975,203,888.00				14,272,724,277.00
5.1.1	BELANJA PEGAWAI				12.975.203.888				14.272.724.277
5.1.1	Belanja Pegawai				12.975.203.888				14.272.724.277
5.1.1.1	Gaji dan Tunjangan				7.102.523.888				7.812.776.277
5.1.1.1	Gaji Pokok				5.490.998.266				6.040.098.092
5.1.1.1	Tunjangan Keluarga				468.266.198				515.092.818
5.1.1.1	Tunjangan Jabatan				221.507.000				243.657.700
5.1.1.1	Tunjangan Fungsional Khusus				5.005.000				5.505.500
2	Tunjangan Umum				263.868.134				290.254.948
5.1.1.1	Tunjangan Beras				340.010.162				374.011.178
5.1.1.1	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				139.925.500				153.918.050
5.1.1.1	Pembulatan Gaji				212.226				233.449
5.1.1.1	Iuran Asuransi Kesehatan				172.731.402				190.004.542
5.1.1.2	Tambahan Penghasilan PNS				5.872.680.000				6.459.948.000
5.1.1.2	Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja				5.686.692.000				6.255.361.200
5.1.1.2	Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja				185.988.000				204.586.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
	BELANJA LANGSUNG				8,882,560,000.00				10,545,384,070.00
1.02.07.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				8,882,560,000				10,545,384,070.00
1.02.07.1.02.07.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik		100 Persen	2,116,290,000				2.785.057.000.00
1.02.07.1.02.07.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat/dokumen untuk keperluan internal dan eksternal instansi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau	230 Surat/Dokumen	10,000,000			240 Surat/Dokumen	11.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah telp dan listrik yang harus dibayar	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau	2 Telp & 2 Meteral Listrik	240,000,000			2 Telp & 2 Meteral Listrik	330.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah mobil dinas yang dirawat dan di perpanjang izin	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11 mobil dinas	192,000,000			11 mobil dinas	211.200.000,00
1.02.07.1.02.07.01.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah Alat kebersihan & honor tenaga kebersihan (CS) kantor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	30 alat & 11 org CS	320,000,000			30 alat & 11 org CS	350.394.000,00
1.02.07.1.02.07.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang di sediakan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau	51 Unit	105,000,000			55 Unit	110.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen yang dicetak dan digandakan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	25 Jenis Barang Cetak & Penggandaan	110,000,000			30 Jenis Barang Cetak & Penggandaan	60.500.000,00
1.02.07.1.02.07.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan alat-alat listrik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	19 unit	40,000,000			25 unit	44.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah surat kabar dan perundang-undangan yang di sediakan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6036 eks	42,000,000			6036 eks	46.200.000,00
1.02.07.1.02.07.01.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah makanan minum yang di sediakan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9125 Kotak	130,000,000			9125 Kotak	153.087.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
1.02.07.1.02.07.01.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	110 kali	583,000,000			110 kali	748.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.01.022	Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD	Jenis informasi dan publikasi program kegiatan Dinas PMD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3 Jenis	195,000,000			3 Jenis	550.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.01.157	Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor	Jumlah Keamanan yang diperkerjakan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5 orang	149,290,000			6 orang	170.676.000,00
1.02.07.1.02.07.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja		100 Persen	356,160,000				2.478.190.000,00
1.02.07.1.02.07.01.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan kantor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15 Unit	67,000,000			17 Unit	288.640.000,00
1.02.07.1.02.07.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Dinas PMD Provinsi Riau	15 unit komputer, 15 unit printer, UPS 15 unit	73,160,000			20 unit	432.300.000,00
1.02.07.1.02.07.01.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang di sediakan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	26 unit	17,000,000			30 unit	30.250.000,00
1.02.07.1.02.07.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang disediakan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	84 x pemeliharaan	15,000,000			84 x pemeliharaan	33.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.02.040	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Paket Rehab gedung kantor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3 paket	150,000,000			3 paket	1.650.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.02.199	Penyediaan Sarana Kearsipan	Jumlah sarana kearsipan	Dinas PMD Provinsi Riau	11 unit	34,000,000			15 unit	44.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara		100 Persen	107,990,000				156.530.000,00
1.02.07.1.02.07.01.05.001	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	49 orang	90,000,000			49 orang	126.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
1.02.07.1.02.07.01.05.012	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Jumlah ASN dan PTT Dinas PMD yang terbina fisik dan mental	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	90 orang	17,990,000			90 orang	30.030.000,00
1.02.07.1.02.07.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan penyampaian laporan		100 Persen	451,350,000				818.214.100,00
1.02.07.1.02.07.01.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4 Laporan	-			4 Laporan	38.500.000,00
1.02.07.1.02.07.01.06.005	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Terlaksananya kegiatan Dinas PMD yang baik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 dokumen 3 laporan	46,000,000			1 dokumen 3 laporan	38.500.000,00
1.02.07.1.02.07.01.06.006	Rapat Koordinasi pada setiap SKPD	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan PMD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	50 orang	-			50 orang	275.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.06.025	Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulan, Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3 Laporan 4 laporan	119,350,000			3 Laporan 4 laporan	130.900.000,00
1.02.07.1.02.07.01.06.030	Penyusunan rencana strategis (RENSTRA) SKPD	Jumlah Dokumen Renstra OPD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 dokumen	65,000,000			1 dokumen	82.500.000,00
1.02.07.1.02.07.01.06.093	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan SKPD	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil program/kegiatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 Dokumen 50 orang	221,000,000			1 Dokumen 50 orang	252.814.100,00
1.02.07.1.02.07.01.15.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Tingkat Swadaya Masyarakat Dalam Pembangunan (dari Total Pendapatan Desa)		0,1 Persen	2,947,860,000				2.036.372.240,00
1.02.07.1.02.07.01.15.007	Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BB-GRM) Tk. Provinsi	Jumlah kab/kota yang mengikuti bulan bakti gotong royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Provinsi Riau	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	400 orang	400,000,000			400 orang	350.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.15.009	Peningkatan Kapasitas Pengurus LPM	jumlah pengurus LPM yang mengikuti peningkatan kapasitas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	140 orang	250,000,000			140 orang	305.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
1.02.07.1.02.07.01.15.014	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (PKK)	Jumlah pengurus PKK yang mengikuti peningkatan kapasitas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	120 orang	1,112,000,000			120 orang	250.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.15.028	Pemasyarakatan dan Penguatan Kelembagaan PAMSIMAS	Jumlah kelompok KP-SPAM yang di fasilitasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	60 orang	200,000,000			60 orang	220.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.15.031	Peningkatan Kapasitas Pengurus Lembaga Adat Melayu Se- Provinsi Riau	Jumlah peserta peningkatan LAM se Prov Riau	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100 orang	350,000,000			100 orang	350.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.15.032	Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional	jumlah alat TTG tingkat nasional	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 kab/kota 500 orang	387,860,000			12 kab/kota 500 orang	440.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.15.033	Peningkatan Pelayanan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM)	Jumlah kab/kota dan di bina dan mendapatkan peningkatan pelayanan unit pengaduan masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 kab/kota	110,000,000			12 kab/kota	121.372.240,00
	Pembinaan Administrasi Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Se- Provinsi Riau/ Pendamping Desa	Jumlah Kabupaten yang mendapatkan pembinaan administrasi pendampingan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10 Kabupaten	138,000,000				
1.02.07.1.02.07.01.16.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan Yang Berkembang (BUMDes, Pasar Desa dan POSYANTEK)		BUMDes : 50; Pasar Desa : 50 ; POSYANTEK: 30	828,220,000				440.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.16.009	Bimbingan Teknis Pengelolaan Pasar Desa se- Provinsi Riau	Jumlah Pengelola Pasar Desa yang mengikuti BIMTEK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	50 desa	346,000,000			50 desa	220.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.16.020	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan BUMDes Se- Provinsi Riau	Jumlah pengurus yang mendapatkan pembinaan pengelolaan BUMDes se- Provinsi Riau	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	60 orang	350,220,000			750 orang	220.000.000,00
	Pemetaan Pembangunan Kawasan Pedesaan	Jumlah Dokumen Pemetaan Pembangunan Kawasan Pedesaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 Dokumen	132,000,000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
1.02.07.1.02.07.01.18.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Akuntabel (%)		35 Person	2,074,690,000				1.831.020.730,00
1.02.07.1.02.07.01.18.003	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur desa yang mengikuti pelatihan manajemen pemerintahan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	40 orang	150,000,000			40 orang	165.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.18.005	Penyusunan Data Profil Desa/Kelurahan	Jumlah desa /kel yang di fasilitasi dalam rangka penguatan Profil desa dan kelurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 kab/kota	100,000,000			12 kab/kota	110.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.18.009	Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Pelaksanaan Peningkatan kapasitas badan permusyawaratan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	40 orang, 10 BPD terbaik	250,000,000			40 orang, 10 BPD terbaik	275.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.18.017	Bimbingan Teknis Penyusunan RPJMDes dan RKPDes Bagi Aparatur Desa se- Provinsi Riau	Jumlah aparatur PMD kecamatan dan desa yang mengikuti BIMTEK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	50 orang, 50 BUMDes	212,000,000			50 orang 50 BUMDes	256.001.900,00
1.02.07.1.02.07.01.18.021	Pembinaan Terhadap Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penataan Wilayah Desa	jumlah kabupaten/kota yang di fasilitasi dalam rangka penataan Desa/Kelurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 kab/kota 50 desa	75,690,000			12 kab/kota 50 desa	82.500.000,00
1.02.07.1.02.07.01.18.026	Rapat Kerja Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Jumlah peserta rapat kerja aparatur desa kelurahan dan BPD pada 12 kab/kota di provinsi riau	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	156 orang	175,000,000			156 orang	192.500.000,00
1.02.07.1.02.07.01.18.027	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Provinsi Riau	Jumlah peserta BIMTEK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100 orang	220,000,000			500 orang	266.752.640,00
1.02.07.1.02.07.01.18.028	Bimbingan Teknis Manajemen Aset Desa	Terlaksananya kapasitas aparatur pemerintahan Desa dalam pengelolaan aset Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	90 orang	202,000,000			90 orang	208.266.190,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
1.02.07.1.02.07.01.18.029	Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Terdapatnya Data evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan sesuai dengan Katagori Penilaian	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10 Desa dan 12 Kelurahan	274,000,000			10 Desa dan 12 Kelurahan	275.000.000,00
	Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa	Jumlah Laporan Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 Dokumen	74,000,000				
	Peningkatan Kapasitas Pendamping Profesional Desa Se- Provinsi Riau	Jumlah Pendamping Profesional Desa yang mengikuti Pelatihan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	147 orang	342,000,000				
TOTAL					8,882,560,000				10,545,384,070.00

BAB IV

PENUTUP

4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja Awal (Renja Awal) Dinas Provinsi Riau Tahun 2019 merupakan agenda tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018 dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2014-2019, dan Rencana Strategis Dinas PMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019. Dan sangat penting artinya untuk menjadi acuan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Berdasarkan Permendagri No 86 tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019 dalam upaya sinkronisasi pelaksanaan Program dan kegiatan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bersumber dari APBD dan APBN yang harus berpedoman pada (RKP, RPJMN, RPJMD Provinsi, RENSTRA dll).

4.3 Rencana Tindak Lanjut

- a. Agar Renja ini menjadi pedoman bagi pengelola manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- b. Renja ini Diharapkan kepada Bagian dan Bidang menjadi acuan dalam penyusunan anggaran pada tahun berikutnya.
- c. Dalam penyusunan anggaran harus sesuai dengan kebutuhan, cepat, sesuai dengan waktu yang ditentukan agar penyusunan anggaran dapat dilaksanakan dengan baik.

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini menjadi sangat penting artinya untuk menjadi acuan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggungjawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Secara kontinyu dokumen ini juga menjadi acuan dalam dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas PMD Provinsi Riau Provinsi Riau sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang seperti kata bijak mengatakan Pekerjaan yang baik tanpa perencanaan hanya akan sulit, Perencanaan yang baik tanpa pelaksanaan hanya akan jadi arsip.

Pekanbaru, Januari 2018

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI RIAU,**



Drs. H. SYARIFUDDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP : 19620504 198803 1 006